

[NU Era Gus Dur di Mata Djohan Effendi](#)

Ditulis oleh Muhammad Iqbal pada Senin, 20 November 2017

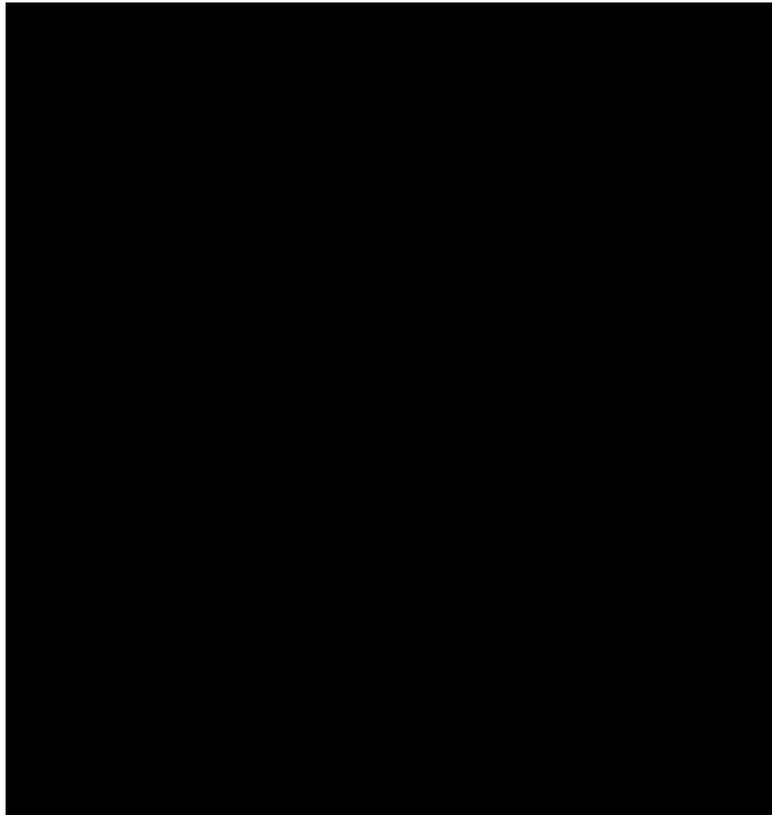


Ibu pertiwi berduka. Dr. Djohan Effendi, pejuang toleransi yang militan itu [berpulang ke pangkuan-Nya](#) di Geelong, Australia, pada Jumat, 17 November 2017, dalam usia 78 tahun. Semasa hidup, ‘Sang Pelintas Batas’ secara konsisten berjuang untuk membangun dialog dan perdamaian antaragama/iman.

Selain itu, Djohan Effendi yang lahir di Kandangan, Kalimantan Selatan pada 1 Oktober 1939, juga [dikenal dekat dengan Abdurrahman Wahid \(Gus Dur\)](#) dan cukup intens mengamati perkembangan Islam Nusantara, khususnya Nahdlatul Ulama.

Sebagai bukti dari warisan intelektualnya, Djohan pernah meneliti dan menulis disertasi untuk meraih gelar doktor di Universitas Deakin, Geelong, Australia tentang NU semasa kepemimpinan Gus Dur.

Karya mantan Sekretaris Negara [era Presiden Abdurrahman Wahid](#) ini kemudian diterbitkan dengan judul *A Renewal Without Breaking Tradition: The Emergence of the New Discourse in Indonesias Nahdlatul Ulama during The Abdurrahman Wahid* (2008),—edisi bahasa Indonesia-nya berjudul *Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi: Wacana Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus Dur* (2010).



Karya Djohan Effendi, edisi bahasa Indonesia: Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi: Wacana Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus Dur (Foto: bukubukubekas.wordpress.com)

Djohan menganalisa bahwa telah terjadi perubahan besar di lingkungan Nahdlatul Ulama sejak kembali ke Khittah 1926. Hal ihwal ini diawali oleh keterpilihan Gus Dur sebagai Ketua Umum PBNU.

[Gus Dur](#) telah memberi inspirasi kepada kiai-kiai muda NU untuk terlibat dalam wacana keagamaan secara kritis. Lebih dari itu, Gus Dur menjadi benteng bagi pemikiran-pemikiran kritis di kalangan generasi muda NU dari serangan generasi kamitua.

Keputusan Muktamar NU di Situbondo pada 1984 untuk kembali ke Khittah 1926 dan memilih pasangan Kiai Ahmad Siddiq (1926-1991) sebagai Rais Am dan Abdurrahman Wahid (1940-2009) sebagai Ketua Umum PBNU, membuka lembaran baru bagi NU untuk perkembangan selanjutnya.

Kepemimpinan Gus Dur

Kepemimpinan Gus Dur sejak 1984, bisa diteroka sebagai tonggak yang mendukung perubahan dalam NU. Gus Dur mengambil dua langkah penting sejak menjadi Ketua

Tanfidziyah.

Pertama, dia menyesuaikan posisi NU sesuai dengan keputusan kembali ke Khittah '26, menarik NU dari kegiatan politik formal dan keluar dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Baca juga: *Kalimat Singkat, Padat, dan Tepat*

Penyesuaian posisi politik penting untuk penentuan orientasi NU bagi pembangunan umat dibandingkan dengan politik. Strateginya ini dinilai cukup berhasil dalam atmosfer rezim Soeharto yang bertangan besi.

Kedua, Gus Dur melakukan penyesuaian posisi teologi, fikih, dan tasawuf dalam *Ahlus-Sunnah wal-Jamaah* (Aswaja). Penyesuaian posisi teologi ini penting karena sejak Khittah '26, NU dalam praktiknya merupakan organisasi yang menekankan pada *jam'iyah dinniyah-nya*—sedangkan sebelumnya ditekankan pada kegiatan politiknya—*jam'iyah dinniyah wa siyasa*.

Dalam konteks ini, “NU harus mengambil langkah-langkah untuk membuat kepercayaan teologinya sebagai landasan perkembangan masyarakatnya. Namun, pada waktu yang sama, secara teologis NU tidak siap melakukan perihal ini. Lagi pula, terdapat banyak tantangan terhadap pandangan teologis NU, terutama berkelindan dengan masalah hak asasi manusia, termasuk masalah kesetaraan gender,” ujar Djohan.

Kepemimpinan Gus Dur—di mata Djohan—telah mendorong pelbagai perubahan semacam ini dalam wacana keagamaan NU. Tanpa tedeng aling-aling, Gus Dur menulis dalam pelbagai jurnal dan surat kabar berupa artikel-artikel yang mempertanyakan dan mengkritik doktrin keagamaan NU.

Lebih jauh, Gus Dur mendorong intelektual muda di kalangan NU untuk lebih intensif mewujudkan kritik-kritik itu. Jadi, NU di bawah kepemimpinan Gus Dur mengalami perkembangan yang signifikan dalam pemikiran baru.

Kenyataan ini diakui oleh berbagai kalangan dan sampai batas tertentu para sarjana yang mengamati Islam berpandangan bahwa NU lebih dinamis dan maju dalam bidang pemikiran keagamaan tinimbang dengan organisasi-organisasi Islam lain. Hal ini mungkin

benar, terutama kalau kita melihat sumbangan Gus Dur sebagai seorang individu.

Sebuah kenyataan bahwa Gus Dur, menurut Djohan, melalui berbagai kegiatan, secara tidak langsung mendorong kiai-kiai muda untuk mengembangkan kegiatan mereka dalam lingkungan pesantren.

Perihal ini tidak hanya dalam kegiatan mengajar dan belajar, tetapi juga dalam kegiatan pengembangan masyarakat dan pengembangan wacana keagamaan. Keterlibatan dalam pengembangan masyarakat, menempatkan mereka dalam jaringan sosial yang lebih luas, baik di tingkat wilayah maupun nasional.

Dalam kaitan ini, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) yang didirikan pada 1983 oleh sejumlah kiai dan pimpinan LSM memainkan peranan dalam memfasilitasi berbagai kegiatan yang melibatkan jaringan nasional kiai muda melalui serangkaian seminar dan lokakarya.

Baca juga: Agama, Semiotika untuk Berdusta

Salah satu program yang diusung oleh P3M adalah serangkaian seminar bagi para kiai muda yang disebut *halaqah*. *Halaqah* sebenarnya kelanjutan dari serangkaian diskusi keagamaan dalam bentuk *bahtsul-kitab*, yakni telaah literatur keagamaan yang diprakarsai oleh Gus Dur selaku Ketua Umum NU.

Dia meminta intelektual muda NU, Masdar Farid Mas'udi, untuk mengagendakan dan menyelenggarakan kegiatan itu. Dalam pelaksanaannya, teks-teks keagamaan yang dianggap sakral di lingkungan pesantren didiskusikan secara kritis, sesuatu yang tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh para kiai senior.

Bagi mereka, kritik yang tidak biasa itu merupakan sesuatu yang sangat mengusik perasaan. Tak mengherankan jika kemudian kegiatan itu sebagai penyimpangan dari tradisi NU dan sebuah pelanggaran terhadap etika santri. Karena alasan ini, kegiatan itu tidak dilanjutkan.

Namun, sejumlah kiai muda merasakan suatu kebutuhan untuk membuat sebuah forum di mana mereka berkesempatan mendiskusikan pelbagai masalah sosial dari perspektif agama. Dari sinilah P3M mengagendakan serangkaian seminar yang disebut *halaqah*.

Topik-topik yang diagendakan untuk didiskusikan menunjukkan bahwa *halaqah* tidak hanya mewicarakkan masalah keagamaan, tetapi juga masalah sosial politik.

Kegiatan ini juga tidak sekadar kegiatan yang bersifat murni akademik, tetapi lebih penting lagi, ia juga merupakan usaha untuk memahami masalah-masalah riil yang terjadi dalam masyarakat secara lebih tepat dan berusaha ikut serta memberikan sumbangan yang bisa mereka lakukan, dari sudut pandang mereka selaku pemimpin komunitas agama.

Di antara topik-topik itu ada dua topik yang sangat penting: **pertama**, perluasan makna bermazhab (*tamadzdzuhab*). Semula istilah ini dipahami sama dengan bertaklid pada pendapat (*qawl*) imam (atau ulama-ulama) mazhab tanpa mempertanyakannya dan sekarang dimafhumi juga sebagai mengikuti metode (*manhaj*) *ijtihad* imam mazhab.

Perluasan makna bermazhab ini mengandung implikasi bahwa pendapat yang menganggap pintu *ijtihad* sudah tertutup sepeninggal keempat imam mazhab (Abu Hanifah, Malik ibnu Anas, asy-Syafi'i, dan Ahmad ibnu Hanbal) sudah tidak relevan lagi.

Kedua, mereka berusaha merumuskan kembali konsep *Ahlus-Sunnah wal-Jamaah* yang lebih relevan dengan tuntutan kontemporer, yang mengundang kecaman dari sejumlah kiai senior. Topik-topik ini masih terus dibicarakan dan belum mencapai simpulan yang tetap.

Baca juga: Keajaiban Gus Dur dalam Kesaksian Dr. Al Chaidar

Kedua topik itu, dari perspektif NU, sungguh sangat penting dan bisa dianggap sebagai sebuah terobosan yang membawa dampak pada perkembangan NU di masa depan.

Sumbangsih Gus Dur

Bertautan dengan wacana sosial politik, pelbagai topik yang diperbincangkan dalam *halaqah* adalah Kebutuhan untuk Pengembangan Fikih Sosial, Teologi Tanah, Fikih Perpajakan, Fikih Lembaga Permusyawaratan/Perwakilan, Fikih tentang Kepemimpinan yang Adil.

Selain itu juga didiskusikan dan dikembangkan wacana gender khususnya dan masalah sosial politik umumnya dari perspektif Islam.

Wacana keagamaan di kalangan NU muda yang terjadi era Gus Dur, ketika dia memimpin NU merupakan sisi lain dari kebangkitan Islam di Indonesia, suatu sisi yang cukup berbeda dibandingkan dengan gerakan modernis.

Ia menunjukkan kebangkitan sikap kritis para kiai muda dan menandai kebangkitan semangat menelaah kembali pengetahuan keagamaan tradisional dan menerapkannya dalam konteks baru era kiwari.

Gus Dur juga membuktikan sikap terbuka generasi muda NU, baik laki-laki maupun perempuan, terhadap ide-ide baru dan mengambilnya tanpa ragu-ragu.

Ia juga memperlihatkan sikap kritis terhadap kiai-kiai senior, tidak secara langsung, tetapi melalui pengungkapan pendapat yang jelas berbeda dari pandangan yang selama ini diterima tanpa pertanyaan.

Kemunculan para kiai muda inilah, yang mempunyai makna besar pada transformasi sosial yang berlangsung di Indonesia sebagai negeri yang berjuang menumbuhkan masyarakat sipil yang memerlukan pemimpin-pemimpin yang bebas, lahir dari dan hidup bersama masyarakat.

Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari peranan dan sumbangan Abdurrahman Wahid sebagai pemimpin Nahdlatul Ulama, periode 1984-1999.

Arkian, sangatlah jelas bahwa apa yang dirancang Gus Dur dalam usaha mengembangkan pemikiran dan penerapan Aswaja tanpa mempersoalkan rumusan yang sudah terbakukan sebagai ideologi Nahdlatul Ulama dan praktikal untuk menjawab tantangan dan tuntutan pembangunan kehidupan masyarakat yang majemuk.

Menurut Djohan Effendi, secara konseptual, kontekstual, dan komprehensif, Gus Dur berusaha menerjemahkan Aswaja sebagai akidah keagamaan ke dalam perjuangan kemasyarakatan yang didasarkan atas prinsip *tawasuth* (berdiri di tengah-tengah), *tawazun* (seimbang dalam pelbagai hal), *i'tidal* (tegak lurus), dan *tasamuh* (toleransi).